

Jurnal

MASYARAKAT DAN BUDAYA

Terakreditasi No. 21/E/KPT/2018

Volume 22 No. 1 2020

Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz

Gutomo Bayu Aji

Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah

Nindyo Budi Kumoro

Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat

Tine Suartina

Nasionalisme Masyarakat Natuna

Budiana Setiawan

Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas:

Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah

Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrum

Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya

Miranti Dwi Yuniarti

Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif

Minoritas di Yogyakarta dan Bandung

Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya

Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga

Wisnu Adihartono



Daftar Isi
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 22 No. 1 Tahun 2020

	Halaman
Pengantar Redaksi Topik:	iii
☞ Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz <i>Gutomo Bayu Aji</i>	1
☞ Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah <i>Nindyo Budi Kumoro</i>	13
☞ Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat <i>Tine Suartina</i>	25
☞ Nasionalisme Masyarakat Natuna <i>Budiana Setiawan</i>	43
☞ <i>Frontierisation</i> dan <i>Defrontierisation</i> Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas: Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah <i>Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrun</i>	57
☞ Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya <i>Miranti Dwi Yuniarti</i>	75
☞ Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung <i>Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya</i>	89
☞ Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga <i>Wisnu Adihartono</i>	103
Tinjauan Buku:	
☞ Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia <i>Riwanto Tirtosudarmo</i>	115

NASIONALISME MASYARAKAT NATUNA

NATIONALISM: THE CASE OF PEOPLE IN NATUNA

Budiana Setiawan
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
budianasetiawan@gmail.com

Abstract

Natuna in Riau Islands is one of outermost region of Indonesia, which is considered to have disintegration potential. Malaysia once claimed that Natuna should be part of its territory. This paper aims to answer the following questions. What is the sense of nationalism of people in Natuna? Is there a potential disintegration of Natuna community, to choose to be a part of Malaysia? What is government's effort to protect Natuna, so it cannot be separated from sovereignty territory of Indonesia? The purpose of this paper is therefore to indicate factors that determine nationalism; to describe disintegration potentials; and to know government's efforts to safeguard Natuna as an area of sovereignty of Republic of Indonesia. This paper is based on a qualitative research, that data collection techniques employed through in-depth interviews, observations, and literature reviews. The results showed that geographical closeness of economic and socio-cultural with Malaysia does not decrease sense of nationalism in the Natuna community. Natuna community views Indonesia as a large country with a wider area and more population than Malaysia, and is a respected country in Asian region.

Keywords: integration, disintegration, nationalism, Malaysia, Republic of Indonesia, outermost region.

Abstrak

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah terluar dari NKRI, sehingga dianggap mempunyai potensi disintegrasi. Terlebih, Malaysia pernah mengklaim bahwa wilayah Natuna seharusnya masuk ke dalam wilayahnya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut. Bagaimana rasa nasionalisme masyarakat Kabupaten Natuna yang secara geografis, ekonomi, dan sosial budaya lebih dekat dengan Malaysia? Adakah potensi disintegrasi masyarakat Kabupaten Natuna, untuk memilih menjadi bagian dari Malaysia? Bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga Kabupaten Natuna agar tidak terlepas dari wilayah kedaulatan NKRI? Tujuan artikel ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menentukan rasa nasionalisme masyarakat Natuna; memperoleh gambaran akan potensi disintegrasi masyarakat Natuna; serta mengetahui upaya pemerintah untuk menjaga Kabupaten Natuna sebagai wilayah kedaulatan NKRI. Tulisan ini berdasarkan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedekatan geografis, ekonomi, dan sosial budaya dengan Malaysia tidak menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat Natuna rendah dan berkeinginan untuk disintegrasi. Hal ini disebabkan masyarakat Natuna memandang Indonesia sebagai negara besar yang wilayahnya lebih luas dan penduduknya lebih banyak daripada Malaysia, serta merupakan negara yang disegani di kawasan Asia.

Kata kunci: integrasi, disintegrasi, nasionalisme, Malaysia, NKRI, wilayah terluar.

Gambaran Singkat Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah kabupaten ini berupa gugusan kepulauan di tengah Laut Natuna Utara. Secara geografis wilayah Kabupaten Natuna diapit oleh Malaysia bagian barat (Semenanjung Malaysia) dan Malaysia bagian timur (Sabah dan Sarawak di bagian utara Pulau Kalimantan) (lihat gambar 1.). Secara geografis, Kabupaten Natuna juga lebih dekat dengan Negara Bagian Sarawak di Malaysia daripada Kota Tanjung

Pinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menyebabkan aksesibilitas dan interaksi masyarakatnya lebih dekat dan lebih mudah ke Sarawak daripada ke Kota Tanjung Pinang.

Kabupaten ini secara astronomis terletak pada posisi 01° 18' 00" – 06° 50' 15" Lintang Utara dan 104° 48' 30" – 110° 02' 00" Bujur Timur. Secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah timur dengan Laut Natuna, sebelah selatan dengan Kabupaten Bintan (Provinsi Kepulauan Riau), dan sebelah barat dengan Semenanjung Malaysia (*Kabupaten Natuna dalam Angka 2017: 3*).



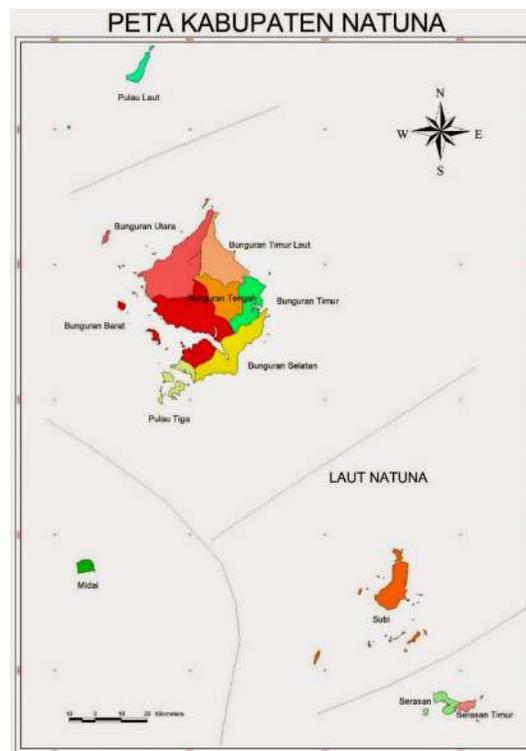
Gambar 1.

Kabupaten Natuna, yang “diapit” Malaysia Bagian Barat dan Bagian Timur

Luas wilayah Kabupaten Natuna secara keseluruhan mencapai 224.684,59 km², terdiri dari luas daratan 2.001,3 km² dan luas lautan 222.683,29 km². Dengan demikian, luas daratan kabupaten ini hanya 0,9% dari seluruh luas wilayahnya. Sebagai sebuah daerah kepulauan, kabupaten ini memiliki 154 pulau. Dari jumlah tersebut, hanya 27 pulau (17,53%) yang berpenghuni, sedangkan 127 pulau lainnya (82,44%) tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut dikelompokkan dalam dua gugusan, yakni Gugusan Pulau Natuna (terdiri atas Pulau Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut, dan Pulau Tiga) dan Gugusan Pulau Serasan (terdiri atas pulau-pulau di Serasan, Subi Besar, dan Subi Kecil) (*Kabupaten Natuna dalam Angka 2017*: 7-8). Di antara pulau-pulau tersebut, Pulau Bunguran adalah pulau yang terbesar, dengan luas mencapai 1.259,87 km² atau 62,95% dari keseluruhan luas daratan (lihat gambar 2). Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan sensus tahun 2016 sebanyak 75.282 jiwa, terdiri atas 38.826 laki-laki dan 36.456 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 38 jiwa per km² (*Kabupaten Natuna dalam Angka 2017*: 63).

Kabupaten Natuna pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Pada tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Kepulauan Natuna disahkan sebagai kabupaten tersendiri yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau, dengan wilayah meliputi gugusan Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas.¹ Kemudian pada tanggal

31 Juli 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008, dibentuk kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna, yakni Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan wilayah gugusan Kepulauan Anambas yang terletak di sebelah barat daya gugusan Kepulauan Natuna (Nuraini, 2008).



Gambar 2.

Peta Kabupaten Natuna

¹Adapun Provinsi Kepulauan Riau sendiri baru terbentuk pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi baru ini meliputi 5 kabupaten dan 2 kota,

yakni: Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga.

Natuna dalam Perjalanan Sejarah

Sejak dahulu Kepulauan Natuna menjadi wilayah yang strategis untuk diperebutkan oleh banyak kerajaan karena menjadi jalur pelayaran perdagangan yang ramai, yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Semenanjung Malaka dan Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1597 wilayah Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Pattani² dan Kesultanan Johor.³ Namun, pada abad XIX Kesultanan Riau di Pulau Sumatera mengambil alih penguasaan terhadap kepulauan Natuna tersebut.

Setelah berdirinya sebuah negara baru di wilayah bekas jajahan Belanda bernama Republik Indonesia pada tahun 1945, delegasi dari Kesultanan Riau ikut menyerahkan kedaulatannya pada Republik Indonesia. Karena wilayah Kepulauan Natuna pada saat itu berada dalam kekuasaan Kesultanan Riau, maka wilayah Kepulauan Natuna juga dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pada 18 Mei 1956 Pemerintah Republik Indonesia pun secara resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya ke PBB (Tampi, 2017: 4).

Adapun Traktat London pada tahun 1824 yang merupakan perjanjian antara Inggris dengan Belanda tentang pembagian wilayah jajahan, tidak secara tegas memasukkan Kepulauan Natuna ke dalam wilayah jajahan Inggris maupun Belanda. Dengan demikian, klaim tentang Natuna menjadi bagian dari wilayah Indonesia tersebut bukan didasarkan pada Traktat London (Susilowati, dkk. 2014: 163). Ada kemungkinan, klaim atas Natuna tersebut berdasarkan padapertimbangan bahwa wilayah Natuna pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Riau. Oleh karena itu, wilayah Natuna diklaim oleh Pemerintah Indonesia masuk dalam wilayah Indonesia.

Klaim Pemerintah Indonesia terhadap wilayah Kepulauan Natuna menimbulkan perselisihan dengan Malaysia. Malaysia menyatakan bahwa kepulauan Natuna seharusnya menjadi milik Malaysia. Ada dua alasan yang digunakan Malaysia untuk mengklaim wilayah Kepulauan Natuna. Pertama, berdasarkan sejarah, sejak

tahun 1597 kepulauan Natuna termasuk dalam wilayah Kesultanan Johor, salah satu kesultanan yang pada saat ini menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia. Kedua, secara geografis wilayah kepulauan Natuna “terjepit” di antara Malaysia bagian barat (Semenanjung Malaysia) dan Malaysia bagian timur (Sabah dan Sarawak di bagian utara Pulau Kalimantan). Bila ditarik garis lurus pada ujung selatan Semenanjung Malaysia dan ujung barat Sarawak, maka kepulauan Natuna seharusnya menjadi milik Malaysia. Dengan demikian, menurut Malaysia, baik secara geografis maupun sejarah, masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kedekatan dengan Malaysia daripada Indonesia.⁴

Malaysia juga menganggap bahwa Traktat London pada tahun 1824 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum penguasaan Republik Indonesia atas wilayah kepulauan Natuna, karena wilayah tersebut tidak pernah benar-benar dikuasai Belanda, seperti halnya Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Menurut Susilowati dan kawan-kawan, di wilayah Natuna juga tidak ditemukan satu pun mercusuar peninggalan Belanda atau Inggris yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa wilayah ini adalah wilayah Hindia Belanda ataupun Inggris (Susilowati, dkk. 2014: 163). Menurut Malaysia, Traktat London tidak menempatkan kepulauan Natuna di bawah kekuasaan Inggris maupun Belanda, tetapi di bawah kekuasaan Kesultanan Melayu Johor yang pada waktu itu sudah di bawah pengaruh Inggris. Kesultanan Johor merdeka dari Inggris pada tahun 1957 dan bergabung menjadi wilayah persekutuan Malaysia. Atas dasar hal tersebut, Malaysia akhirnya menyimpulkan bahwa sesuai dengan konsep “*utti possideti juris*” (seperti yang dimiliki sebelumnya), maka kepulauan Natuna yang merupakan wilayah kerajaan Johor seharusnya menjadi bagian dari Malaysia. Dengan kata lain, karena kepulauan Natuna tidak pernah menjadi daerah jajahan Belanda, maka seharusnya daerah tersebut bukan bagian dari Indonesia.⁵

⁴Mustafa Kamal. 2014. *Malaysia Ingin Kepulauan Natuna Menjadi Wilayahnya*. https://www.kompasiana.com/alchemist/malaysia-inginkan-kep-natuna-menjadi-wilayahnya_54f7bc7ba333112b6f8b4cc7, diunduh tanggal 27 November 2017.

⁵Mustafa Kamal. 2014. *Malaysia Ingin Kepulauan Natuna Menjadi Wilayahnya*. <https://www.kompasiana.com/alchemist/malaysia-inginkan-kep->

²Sekarang masuk wilayah Thailand

³Sekarang masuk wilayah Malaysia

Sebaliknya, Indonesia mengklaim wilayah kepulauan Natuna sebagai bagian dari wilayahnya karena menganggap ada bukti jejak-jejak kekuasaan Belanda di kepulauan tersebut. Salah satu di antaranya adalah keberadaan lapangan udara di Pulau Subi yang sebenarnya dibangun oleh Pemerintah Jepang pada saat menduduki Indonesia pada 1942. Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, lapangan udara tersebut dibombardir dan diambil alih oleh pasukan Belanda.⁶ Penyerangan Belanda atas lapangan udara yang dibangun oleh Pemerintah Jepang inilah yang merupakan “satu-satunya bukti” kekuasaan Belanda di Natuna.

Untuk memperkuat kedaulatannya di wilayah Natuna, pada 18 Mei 1956 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mendaftarkan kepulauan Natuna ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1962-1966 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam konfrontasi tersebut, kepulauan Natuna menjadi wilayah yang dipersengketakan oleh kedua negara. Konfrontasi tersebut secara politik lebih merugikan Malaysia daripada Indonesia, sehingga untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka Malaysia memilih tidak menggugat status dari kepulauan Natuna (Tampi, 2017: 4). Malaysia pun memilih jalan damai dan membiarkan kepulauan Natuna menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Hingga saat ini Malaysia tidak pernah mengotak-atik lagi keberadaan Kepulauan Natuna. Hal ini berarti Malaysia mengakui kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna.⁷

Kehidupan Masyarakat

Meskipun menjadi bagian dari wilayah Indonesia, namun secara interaksi dalam bidang ekonomi dan sosial-budaya masyarakat Natuna lebih dekat dengan Malaysia daripada Indonesia, terlebih pada masa lalu. Di bidang ekonomi, masyarakat Natuna telah sejak lama menjalin

hubungan perdagangan dengan masyarakat Sarawak, Malaysia bagian timur. Hal ini dikarenakan secara geografis Kabupaten Natuna lebih dekat dengan Kota Kuching, ibukota Negara Bagian Sarawak, Malaysia (dengan jarak sekitar 350 km) dibandingkan dengan Kota Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau (yang berjarak sekitar 545 km) (Susilowati dkk. 2014: 159).

Banyak barang kebutuhan sehari-hari yang didatangkan dari Kota Kuching, Sarawak. Sebaliknya, masyarakat Natuna juga menjual komoditas perkebunan dan perikanan kepada para pedagang dari Sarawak. Hal ini menyebabkan di Natuna banyak ditemukan produk-produk dari Sarawak. Bahkan sebelum tahun 1960-an masyarakat Natuna juga masih menggunakan mata uang ringgit. Mata uang rupiah baru dikenalkan setelah terjadi Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1962-1966.⁸ Meskipun demikian, mata uang ringgit tidak serta-merta hilang, sehingga pada saat itu masyarakat Natuna menggunakan ringgit dan rupiah sekaligus. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 2000.⁹

Kedekatan jarak antara Kabupaten Natuna dengan Sarawak menyebabkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari dari Sarawak lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang didatangkan dari Batam ataupun Tanjungpinang. Hal ini disebabkan oleh jaraknya yang cukup jauh dan sarana transportasi yang kurang memadai. Sarana transportasi laut hanya dilayani oleh kapal perintis yang datang ke Pelabuhan Ranai setiap 13 hari sekali, sehingga barang-barang kebutuhan sehari-hari tidak selalu tersedia. Sementara kapal-kapal dagang dari Sarawak datang hampir setiap hari, sehingga

natuna-menjadi-wilayahnya_54f7bc7ba333112b6f8b4cc7, diunduh tanggal 27 November 2017.

⁶Yuri B.Trisna. 2018. *Pulau Subi, Pusat Pertahanan Udara Jepang di Natuna*. 1 Juni 2018. <https://pelantar.id/berita/kepri-roya/natuna/pulau-subi-pusat-pertahanan-udara-jepang-di-natuna/>, diunduh 25 Februari 2019.

⁷Mustafa Kamal. 2014. *Malaysia Ingin Kepulauan Natuna Menjadi Wilayahnya*. https://www.kompasiana.com/alchemist/malaysia-inginkan-kep-natuna-menjadi-wilayahnya_54f7bc7_ba333112b6f8b4cc7, diunduh tanggal 27 November 2017.

⁸Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah konflik memperebutkan wilayah Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak, antara Federasi Malaysia dengan Indonesia. Konflik itu berlangsung tahun 1962 hingga 1966. Konflik berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia, yang oleh Indonesia dianggap tidak sesuai dengan Persetujuan Manila. Presiden Sukarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia tersebut sebagai “boneka Inggris” dan merupakan kolonialisme dan imperialisme bentuk baru. (Witton, 2003: 28, 944; Mezerik, 1965: 8, 122).

⁹Wawancara dengan Amir, staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, tanggal 18 November 2017.

barang-barang dari Sarawak selalu tersedia dengan harga yang terjangkau (Susilowati dan Masruroh, 2018: 17).

Komposisi penduduk Natuna dapat digambarkan sebagai berikut: Melayu (80%), Jawa (11%), Minang (3%), Batak (2%), Bugis, Sunda, Dayak (masing-masing 1%), serta Banjar dan Sulawesi lainnya (1%). Penduduk dari etnis Melayu relatif menerima keberadaan etnis-etnis lain dengan tangan terbuka. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak terjadi konflik antar suku di tengah-tengah penduduk Natuna (Susilowati, dkk., 2014: 29).

Masyarakat Natuna berbicara dengan bahasa Melayu dialek Malaysia. Sejak puluhan tahun lamanya, masyarakat Natuna juga hanya mendapatkan informasi melalui siaran radio dan televisi dari Malaysia, sehingga tidak mengherankan bila mereka lebih mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di Malaysia daripada di Indonesia. Baru pada tahun 1983 mereka mulai dapat menikmati siaran radio dan televisi dari Indonesia. Mobilitas masyarakat Natuna ke wilayah Indonesia lainnya juga terbatas, karena satu-satunya alat transportasi yang tersedia pada saat itu hanya kapal laut. Jalur pelayaran, khususnya yang menuju Batam dan Tanjungpinang sering terhenti karena sering terjadinya gelombang besar di Laut Natuna Utara.¹⁰

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik yang lengkap, yang disusun dengan kata-kata, yang melaporkan pandangan narasumber secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar belakang yang alamiah (Creswell, 1994: 1). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif meliputi: wawancara mendalam, pengamatan/observasi, dan studi pustaka.

Pengamatan atau observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian, tepatnya di Kota Ranai, ibukota Kabupaten Natuna. Pengamatan dilakukan bertujuan untuk untuk mencatat berbagai hal yang penting berkaitan dengan tujuan penelitian, seperti: kondisi

¹⁰Wawancara dengan Arrofik. Kantor Badan Karantina dan Penjaminan Mutu, Kabupaten Natuna, tanggal 19 November 2017.

geografis, kehidupan sosial budaya masyarakat, interaksi antarkomunitas, dan lain-lain (Bachtiar, 1997: 108-119). Dalam pengamatan dilakukan pendokumentasian tentang perilaku, kondisi masyarakat, aksesibilitas menuju lokasi, fasilitas yang disediakan pemerintah, dan lain-lain.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa komunitas yang dapat ditemui di lapangan maupun dengan unsur-unsur aparatur pemerintahan, seperti aparatur dari Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Kantor Badan Karantina Laut dan Penjaminan Mutu, dan lain-lain (lihat Neuman, 1997: 7). Dalam hal ini kegiatan wawancara mendalam dilakukan bersamaan dengan observasi (lihat Marshal dan Rossman, 1995: 78-80).

Untuk memperkaya data yang diperoleh di lapangan, dilakukan pula studi pustaka, baik sebelum maupun setelah penelitian di lapangan. Sebelum melakukan penelitian di lapangan, dilakukan studi pustaka terlebih dahulu. Dalam studi pustaka ini penulis mencari dan menelaah tulisan-tulisan dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara mendalam, FGD, dan studi kepustakaan tersebut kemudian dianalisis dengan beberapa konsep yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini (Creswell, 1994: 18).

Berdasarkan pendekatan penelitian yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana rasa nasionalisme masyarakat Kabupaten Natuna yang secara yuridis maupun administratif menjadi bagian dari wilayah NKRI, namun secara geografis, ekonomi, dan sosial budaya lebih dekat dengan Malaysia? Kedua, apakah ada potensi disintegrasi masyarakat Kabupaten Natuna, untuk kemudian memilih menjadi bagian dari wilayah Negara Malaysia? Ketiga, bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga Kabupaten Natuna agar tidak terlepas dari wilayah kedaulatan NKRI?

Nasionalisme dan Disintegrasi

Terdapat cukup banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan nasionalisme. Beberapa di antaranya adalah Ernest Renan, Ernest Gellner, Ben Anderson, John Hutchinson, dan Retno Listyarti. Menurut Ernest Renan, ada dua prinsip penting dalam menentukan nasionalisme suatu masyarakat, yakni masa lalu dan masa

kini. Masa lalu dirasakan ketika masyarakat tersebut memiliki warisan memori masa lalu yang sama. Masa sekarang adalah kesepakatan untuk hidup bersama, keinginan untuk melanjutkan investasi dari warisan memori masa lalu yang telah diterima bersama tersebut (Renan, 1992).

Ernest Gellner memandang nasionalisme dari perspektif historis. Menurutnya, nasionalisme adalah pemaksaan budaya yang lebih tinggi (atau lebih maju) pada masyarakat dengan budaya yang lebih rendah (atau lebih tertinggal). Oleh karena itu, pemaksaan nasionalisme terlihat ketika terjadi transformasi masyarakat dari ekonomi dan struktur sosial yang berbasis agraris menjadi berbasis industrialisasi. Dalam “pemaksaan nasionalisme” tersebut, pada prinsipnya harus terjadi kepentingan politik dan nasional yang searah (Gellner, 2006).

Menurut Ben Anderson, nasionalisme lebih dipahami sebagai komunitas politik terbayang. Artinya, nasionalisme tidak menemukan relevansi dan gagal dimaknai oleh masyarakat yang membayangkannya ketika dihadapkan dalam konteks ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pemberian pendidikan wawasan kebangsaan sebagai upaya pemeliharaan rasa kebangsaan belumlah cukup untuk menanamkan rasa nasionalisme. Lebih dari itu, harus ada keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Oleh karena itu, penanaman rasa nasionalisme harus dibarengi dengan upaya untuk memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran (Anderson, 1991).

Menurut John Hutchinson, nasionalisme adalah suatu paham atau ideologi untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya. Menurutnya, nasionalisme lebih merupakan fenomena budaya daripada fenomena politik, karena ia berakar pada etnisitas dan budaya pramodern (Hutchinson, 2004: 34).

Menurut Retno Listyarti, nasionalisme terdiri dari beberapa bentuk, yakni: nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etnis, nasionalisme romantik, nasionalisme budaya, nasionalisme kenegaraan, dan nasionalisme agama. Pertama, nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil), yakni negara memperoleh legitimasi politik dari partisipasi aktif rakyatnya dan keanggotaannya bersifat sukarela. Kedua,

nasionalisme etnis (etnonasionalisme), yakni negara memperoleh legitimasi politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat, dan keanggotaannya bersifat turun-temurun. Ketiga, nasionalisme romantik, yakni negara memperoleh legitimasi politik sebagai sesuatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari suatu bangsa atau ras. Nasionalisme romantik ini menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik mereka. Keempat, nasionalisme budaya, yakni negara memperoleh legitimasi politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun. Kelima, nasionalisme kenegaraan, yakni nasionalisme kewarganegaraan yang dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, sebuah bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Keenam, nasionalisme agama, yakni negara memperoleh legitimasi politik atas dasar persamaan agama (Listyarti, 2007: 28).

Nasionalisme berkaitan erat dengan potensi disintegrasi. Rasanasionalisme yang lemah akan mudah memantik suatu masyarakat untuk disintegrasi. Sebaliknya, rasa nasionalisme yang kuat akan mendorong masyarakatnya untuk mempertahankan integritasnya dengan suatu negara. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disintegrasi adalah merupakan suatu keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990: 201). Menurut Endang Susilowati dan kawan-kawan, potensi disintegrasi pada wilayah pulau-pulau terdepan, terpencil, dan tertinggal adalah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan penduduk di pulau-pulau tersebut. Oleh karena itu, kepekaan dari pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan isu-isu sosial ekonomi di pulau-pulau tersebut (Susilowati dkk., 2014: 158).

Nasionalisme Masyarakat Natuna

Menilik perjalanan sejarah masyarakat Natuna, yang pernah menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Johor, wilayah Kesultanan Riau, sebentar di bawah kekuasaan Jepang, dan akhirnya menjadi bagian dari wilayah Indonesia, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya yang lebih dekat dengan Malaysia daripada Indonesia. Hal demikian tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan rasa nasionalisme mereka? Terlebih lagi

kedekatan letak geografis Natuna dengan Malaysia, kemudahan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan banyaknya informasi yang diperoleh dari Malaysia daripada Indonesia, bukan tidak mungkin akan membawa konsekuensi melemahnya nasionalisme penduduk Natuna. Hal itu masih ditambah dengan kenyataan bahwa pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat belum banyak menyentuh pulau-pulau terdepan, termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Keadaan infrastruktur dan suprastruktur di beranda terdepan Indonesia itu masih jauh tertinggal dari daerah-daerah lain, terutama dengan Jawa. Bila rasa nasionalisme penduduk tidak dibentengi dengan baik, tidak mustahil dapat mengancam integrasi nasional (Susilowati dkk, 2014: 159).

Namun hal yang menarik, kondisi tersebut di atas tidak menjadikan masyarakat Natuna menginginkan disintegrasi dan kemudian bergabung dengan Malaysia. Mereka tampaknya tidak terlalu mempedulikan, apakah keberadaan mereka menjadi bagian dari warga negara Indonesia ataupun Malaysia. Sekalipun secara geografis lebih dekat dengan Malaysia, mereka tidak pernah melakukan upaya untuk melepaskan diri dari Indonesia dan bergabung dengan Malaysia. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap kedua negara tersebut. Bagi mereka, Indonesia adalah sebuah negara besar, dengan wilayah yang jauh lebih luas dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar daripada Malaysia. Di samping itu, masyarakat Natuna lebih melihat nama besar Indonesia dibandingkan dengan Malaysia karena menjadi salah satu negara yang memelopori kemerdekaan sebagai negara-negara jajahan di kawasan Asia. Pada masa-masa awal kemerdekaan kedua negara tersebut, Indonesia menjadi negara yang lebih disegani oleh negara-negara di kawasan Asia dibandingkan dengan Malaysia.¹¹ Ini yang tampaknya menjadi daya tarik bagi masyarakat Natuna untuk tetap memilih menjadi bagian dari Indonesia.

Masyarakat Natuna juga tampaknya tidak terlalu memikirkan sejarah masa lalu yang pernah menjadi bagian dari Kesultanan Johor maupun Kesultanan Riau. Dalam hal ini, meskipun pernah dikuasai Kesultanan Johor (yang sekarang masuk dalam wilayah Malaysia) dan kemudian Kesultanan Riau (yang sekarang

masuk dalam wilayah Indonesia), masyarakat Natuna tampaknya “tidak terlalu terikat secara emosional” dengan kedua kesultanan tersebut. Hal ini karena wilayahnya yang jauh terpisah oleh lautan dengan pusat Kesultanan Johor maupun Kesultanan Riau. Dengan demikian, nasionalisme masyarakat Natuna lebih merupakan fenomena budaya daripada fenomena politik, sebagaimana disampaikan oleh John Hutchinson (2004). Sebagai fenomena budaya, nasionalisme masyarakat Natuna lebih bersifat cair, karena berakar dari sejarah maupun etnisitas Kemelayuan yang dipengaruhi oleh kedua kesultanan tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Retno Listyarti bahwa nasionalisme terdiri dari enam bentuk, yakni: nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etnis, nasionalisme romantik, nasionalisme budaya, nasionalisme kenegaraan, dan nasionalisme agama (Listyarti, 2007: 28). Dari keenam bentuk nasionalisme tersebut, tampaknya yang sesuai untuk diterapkan pada masyarakat Natuna pada khususnya dan bangsa Indonesia pada khususnya adalah nasionalisme kenegaraan yang merupakan kombinasi antara kewarganegaraan dengan etnisitas. Dalam hal ini secara kewarganegaraan, masyarakat Natuna secara legitimasi politik adalah bagian dari warga negara Indonesia. Secara etnisitas, sebagian besar masyarakat Natuna adalah etnis Melayu. Dalam hal ini etnis Melayu tidak hanya terdapat di satu negara saja, melainkan tersebar beberapa negara, yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dengan demikian, masyarakat Natuna secara alamiah mempunyai ikatan etnisitas dengan masyarakat Melayu pada umumnya, baik yang tinggal di wilayah Indonesia (terutama dengan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, pesisir timur Sumatera, dan pesisir barat Kalimantan), maupun yang tinggal di wilayah negara-negara lain. Namun secara legitimasi politik telah menjadi bagian dari warga negara Indonesia, maka keterikatan dengan Indonesia menjadi lebih kuat daripada dengan Malaysia.

Dengan demikian, nasionalisme pada masyarakat Natuna ternyata tidak seperti yang disampaikan oleh Ernest Renan, bahwa untuk menanamkan nasionalisme, suatu masyarakat harus memiliki memori warisan masa lalu, yang kemudian digunakan sebagai kesepakatan untuk hidup bersama pada masa kini (Renan, 1992). Dapat dikatakan bahwa masyarakat Natuna memiliki memori warisan masa lalu dari

¹¹Wawancara dengan Amir, staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna.

kesultanan-kesultanan yang pernah menguasainya, baik dengan Kesultanan Johor maupun Kesultanan Riau.

Nasionalisme pada masyarakat Natuna tampaknya lebih sesuai dengan pendapat Ernest Gellner. Sebagaimana disampaikan oleh Ernest Gellner bahwa nasionalisme terbentuk karena ada pemaksaan budaya yang lebih maju pada masyarakat yang lebih tertinggal (Gellner, 2006). Nasionalisme yang ditanamkan pada masyarakat Natuna secara politik merupakan “pemaksaan budaya” Pemerintah Republik Indonesia terhadap mereka, yang sebagian besar masih hidup sebagai nelayan tradisional.¹² Di sisi lain, masyarakat Natuna sendiri melihat Indonesia sebagai sebuah negara besar yang tentunya dianggap akan menjanjikan transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri, sehingga tidak mempersoalkan ketika diintegrasikan sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Pembangunan dan Nasionalisme

Berkaitan dengan keberadaan pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Adapun tujuan dari pengelolaan pulau-pulau terluar tertuang dalam Pasal 2 yakni: (a) Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan; (b) Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan; dan (c) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan (Tampi, 2017: 4).

Berkaitan dengan hal tersebut, penguatan rasa nasionalisme sebagai bagian dari bangsa Indonesia mustahil dapat ditumbuhkan pada masyarakat Natuna selama pemerintah pusat tidak pernah memberikan perhatian dan pembangunan pada mereka sebagai masyarakat yang tinggal di daerah terluar. Namun dalam kenyataannya, meskipun telah menjadi bagian dari wilayah Indonesia sejak tahun 1956, selama

¹²“Pemaksaan budaya” di sini menggunakan tanda petik, karena selama berpuluh-puluh tahun menguasai wilayah Natuna, Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah berupaya “mengubah” wajah Natuna, dengan pembangunan yang masif sehingga berubah dari masyarakat tradisional ke modern.

berpuluh-puluh tahun tidak ada pembangunan yang signifikan di wilayah Kepulauan Natuna. Pembangunan secara besar-besaran baru mulai terjadi pada beberapa tahun belakangan ini. Hal ini sesuai dengan program Nawacita dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setidaknya terdapat lima kementerian yang diprioritaskan untuk menangani pembangunan di Kabupaten Natuna, yakni: Perikanan dan Kelautan, Pertahanan dan Keamanan, Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral.¹³

Pembangunan yang ditangani oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan dilakukan dengan pertimbangan bahwa kepulauan Natuna memiliki wilayah laut yang sangat luas, dengan potensi sumber daya ikan yang sangat melimpah. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, Kecamatan Natuna Utara, seluas 16,8 hektar. SKPT ini digunakan untuk menampung ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, yang meliputi wilayah Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara. Pembangunan SKPT ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sumberdaya perikanan Laut Natuna mencapai 1,2 juta ton per tahun.¹⁴ Di sisi lain, Laut Natuna juga menjadi jalur pelayaran internasional, sehingga potensi perikananannya rawan dicuri oleh kapal-kapal nelayan asing. Pembangunan SKPT di Selat Lampa ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Natuna.¹⁵

Pembangunan yang ditangani oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan dilakukan

¹³Adit Vero. 2018. *Bupati Natuna Memakai Program Lima Pilar dalam Percepatan Pembangunan Daerahnya*. 24 Januari 2018. <https://www.wartakepri.co.id/2018/01/24/bupati-natuna-memakai-program-lima-pilar-dalam-percepatan-pembangunan-daerahnya/>, diunduh tanggal 18 Februari 2019.

¹⁴*Pengembangan Perikanan: Bangun Ekonomi Maritim dari Natuna*. 16 Januari 2018. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20180116/251/726682/pengembangan-perikanan-bangun-ekonomi-maritim-dari-natuna>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.

¹⁵*Ini Cara Jitu KKP Bantu Nelayan Natuna, Termasuk Memberi 60 Kapal*. Kamis, 7 Desember 2017. <https://www.merdeka.com/uang/ini-cara-jitu-kkp-bantu-nelayan-natuna-termasuk-memberi-60-kapal.html>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.

dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Natuna merupakan wilayah terdepan dan terluar dari Republik Indonesia, sehingga rawan terhadap gangguan keamanan dan wilayah pertahanan terhadap penyusupan dari negara-negara lain, seperti: Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Terlebih Tiongkok yang merasa menguasai wilayah Laut Cina Selatan yang sebagian wilayahnya menjadi bagian dari NKRI.

Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah RI melalui Kementerian Pertahanan dan Keamanan akan menjadikan wilayah Natuna sebagai pusat kekuatan militer, dengan membangun pangkalan militer dan infrastruktur militer, serta menempatkan pasukan TNI dalam jumlah yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk mengamankan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI.¹⁶

Saat ini Kementerian Pertahanan dan Keamanan melakukan sejumlah pembangunan sarana dan prasarana pertahanan negara, antara lain: Pembangunan pelebaran landasan pacu (*runway*) Bandara R. Sajad di Ranai, sehingga dapat didarati oleh dua pesawat tempur sekaligus; Perluasan Dermaga Penagi dan Dermaga Sebang, sehingga dapat digunakan untuk berlabuh kapal-kapal perang. Selain itu, juga akan mendatangkan pasukan TNI dalam jumlah yang cukup banyak, yakni sekitar 15.000 personil, sehingga perlu dibangun penambahan akomodasi untuk menampung para prajurit TNI.¹⁷

Pembangunan yang ditangani oleh Kementerian Pariwisata dilakukan dengan pertimbangan bahwa wilayah Kabupaten Natuna memiliki banyak tempat yang indah dan dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata, seperti: pantai, air terjun, bangunan monumental, dan pulau-pulau kecil. Ada 11 lokasi yang akan dikembangkan sebagai destinasi wisata, yang

mengusung konsep *marine, ecology, and archaeology* (MEA).¹⁸

Selain itu, salah satu upaya untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Natuna adalah dengan penyelenggaraan Festival Senua 2018 pada tanggal 24 Juni 2018. Festival ini berhasil mendatangkan ribuan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.¹⁹ Upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Natuna dilakukan karena saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Riau.

Perairan Natuna juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengembangkan produksi minyak dan gas bumi di perairan tersebut, khususnya di Blok East Natuna. Kebijakan ini didorong oleh Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) yang menginginkan agar pengembangan gas bumi di East Natuna dapat segera terealisasi.²⁰ Blok East Natuna tersebut ditemukan pada tahun 1973 dan diperkirakan memiliki sumber daya sekitar 222 cadangan *trillion standard cubic feet* (TCF), dengan sumber daya kontijen sebesar 47 TCF. Sumber daya sebesar itu merupakan cadangan gas terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, pengembangan gas di Natuna belum terealisasi hingga sekarang karena mengalami berbagai kendala yang selama bertahun-tahun belum berhasil diselesaikan oleh pemerintah, sementara permintaan gas semakin meningkat.²¹

¹⁸Y. Gustaman. 2017. *Pariwisata di Kabupaten Natuna Tertinggal, Begini Respon PLN*. Kamis, 19 Oktober 2017. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/19/pariwisata-di-kabupaten-natuna-tertinggal-begini-respon-pln?page=2>. diunduh tanggal 8 Februari 2019.

¹⁹*Siaran Pers: Festival Senua 2018 Promosikan Pariwisata Kabupaten Natuna*. 1 Juli 2018. <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=4365>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.

²⁰Ahmad Dwi Afriyadi. 2018. *Dorong Pengembangan Gas Natuna, Para Ahli Migas Siap Kumpul Bareng*. Senin, 10 September 2018. Juli 2018. <https://finance.detik.com/energi/d-4204863/dorong-pengembangan-gas-natuna-para-ahli-migas-siap-kumpul-bareng>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.

²¹Ahmad Dwi Afriyadi. 2018. *Dorong Pengembangan Gas Natuna, Para Ahli Migas Siap Kumpul Bareng*. Senin, 10 September 2018. Juli 2018. <https://finance.detik.com/energi/d-4204863/>

¹⁶*Menhan: Pemerintah akan Bangun Pangkalan Militer Terbesar di Natuna*. 10 Maret 2017. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/03/10/menhan-pemerintah-akan-bangun-pangkalan-militer-terbesar-di-natuna-2.html>, diunduh tanggal 8 Februari 2019

¹⁷*Kemhan Bangun Sarana dan Prasarana Pertahanan di Pulau Natuna*, Rabu, 8 Maret 2017. <https://www.kemhan.go.id/2017/03/08/kemhan-bangun-sarana-dan-prasarana-pertahanan-di-pulau-natuna.html>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.

Lalu yang menjadi pertanyaan, apa manfaat eksplorasi dan eksploitasi Lapangan East Natuna tersebut bagi masyarakat Natuna itu sendiri? Menurut Annisa Purwatiningsih dan Masykur, keberadaan Blok East Natuna secara tidak langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Natuna, seperti yang diuraikan di bawah ini.

- (a) Membuka keterisolasikepuluan Natuna sebagai kawasan terpencil, sehingga sebagai implikasinya akan memicu mobilitas penduduk ke kawasan pesisir di sekitar lokasi kegiatan eksploitasi migas untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
- (b) Menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran yang menjadi masalah serius karena pertumbuhan ekonomi yang hanya 4 %.
- (c) Peningkatan kehidupan sosial dengan adanya program pemberdayaan masyarakat (*community development*).
- (d) Partisipasi masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, yaitu sebagai pemasok kebutuhan pokok di sekitar tempat kegiatan.
- (e) Terbangunnya infrastruktur untuk memicu roda perekonomian berbasis kerakyatan.
- (f) Kontribusi eksploitasi migas Natuna ke APBD Kabupaten Natuna dapat digunakan untuk pembangunan Kabupaten Natuna (Purwatiningsih dan Masykur, 2012: 64-65).

Adapun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berperan melakukan kajian dan evaluasi mengenai dampak pembangunan terhadap aspek lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Natuna, misalnya melakukan kajian dampak lingkungan terhadap penggunaan kabel optik dalam program pembangunan Palapa Ring Barat (PRB)²² dan rencana ekspor ikan napoleon (*Cheilinus undulates*) yang merupakan salah satu jenis ikan tangkapan para nelayan Natuna.²³ Dalam hal ini kajian terhadap rencana ekspor ikan napoleon tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian jenis ikan tersebut.

dorong-pengembangan-gas-natuna-para-ahli-migas-siap-kumpul-bareng, diunduh tanggal 8 Februari 2019.

²²Kemen LHK Gelar Rapat Penilaian DELH. Selasa, 30 Januari 2018. <https://www.haluankepri.com/news/detail/109824/kemen-lhk-gelar-rapat-penilaian-delh>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.

²³Ekspor Perdana Ikan Napoleon di Natuna. 6 Februari 2018. <http://www.menlhk.go.id/berita-10086-ekspor-perdana-ikan-napoleon-di-natuna.html>, diunduh tanggal 18 Februari 2019.

Keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang kemudian ditindaklanjuti dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Natuna oleh lima kementerian tersebut, dalam perspektif Ernest Gellner adalah upaya untuk mentransformasikan masyarakat Natuna yang sebelumnya selama puluhan tahun merupakan masyarakat egaliter dan tradisional berubah menjadi masyarakat yang industrialis. Dengan transformasi tersebut, rasa nasionalisme sebagai bagian dari NKRI akan semakin menguat, dan memperkecil potensi disintegrasi. Dalam perspektif Ben Anderson, rasa nasionalisme tersebut terbentuk ketika masyarakat Natuna memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran, sebagaimana yang telah dirasakan oleh warga negara Indonesia lainnya yang telah lebih dahulu menerima pembangunan.

Penutup

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah kepulauan terluar dari NKRI, yang secara geografis, aksesibilitas ekonomi, maupun interaksi sosial budaya masyarakatnya lebih dekat dengan Malaysia. Merunut sejarahnya, Kepulauan Natuna pernah menjadi bagian dari Kesultanan Johor sejak 1597 (sekarang masuk dalam wilayah Malaysia). Namun, pada abad XIX kepulauan Natuna berada di bawah wilayah Kesultanan Riau, sehingga setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, kepulauan ini dimasukkan ke dalam wilayah NKRI. Malaysia pernah menggugat kepemilikan Indonesia dengan menggunakan alasan kedekatan geografis maupun sejarah. Namun sejak konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962-1966, Malaysia tidak pernah lagi mengotak-atik lagi keberadaan Kepulauan Natuna.

Sebagai wilayah yang secara geografis, ekonomi, dan sosial budaya lebih dekat dengan Malaysia, ternyata tidak menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat Natuna rendah dan berkeinginan disintegrasi dari Indonesia kemudian bergabung dengan Malaysia. Hal ini disebabkan oleh cara pandang masyarakat Natuna terhadap Indonesia. Bagi mereka, Indonesia adalah sebuah negara besar dengan wilayah yang jauh lebih luas dan jumlah penduduk jauh lebih banyak daripada Malaysia. Di samping itu, pada awal kemerdekaannya, Indonesia dipandang sebagai negara yang

disevani oleh negara-negara lain di kawasan Asia.

Ditilik dari nasionalisme sebagai fenomena budaya, maka baik ketika masih menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Johor maupun saat menjadi wilayah Kesultanan Riau, keduanya membawa etnisitas budaya Kemelayuan. Hal ini menyebabkan masyarakat Natuna dapat “memilih” sebagai bagian dari budaya Kemelayuan yang dibawa Kesultanan Riau, dan tidak terlalu terikat secara budaya dan historis dengan Kesultanan Johor di Malaysia. Berdasarkan alasan tersebut, maka potensi disintegrasi pada masyarakat Natuna dapat dikatakan rendah.

Ditilik dari bentuk nasionalismenya, masyarakat Natuna termasuk dalam bentuk nasionalisme kenegaraan, yang merupakan kombinasi antara kewarganegaraan dengan etnisitas. Secara kewarganegaraan, masyarakat Natuna adalah bagian dari warga negara Indonesia. Secara etnisitas, mayoritas masyarakat Natuna adalah etnis Melayu. Etnis Melayu tersebar di beberapa negara, yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dengan demikian, rasa nasionalisme masyarakat cukup kuat karena ikatan etnisitas mereka tidak dibatasi satu negara saja. Dengan demikian, masyarakat Natuna dapat “memilih” menjadi bagian dari etnis Melayu yang sekaligus juga warga negara Indonesia.

Meskipun demikian, apabila pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Natuna, sehingga tertinggal dengan daerah-daerah lainnya, maka rasa nasionalisme akan melemah dan potensi disintegrasi dapat meningkat dan mengancam keutuhan wilayah NKRI. Oleh karena itu, pada saat ini pemerintah telah mengupayakan pembangunan di Kabupaten Natuna. Terdapat lima kementerian yang mendapat prioritas untuk menangani pembangunan di Kabupaten Natuna, yakni: Perikanan dan Kelautan, Pertahanan dan Keamanan, Pariwisata, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan sentuhan pembangunan di Kabupaten Natuna tersebut, diharapkan akan semakin menguatkan rasa nasionalisme dan sekaligus mengurangi potensi disintegrasi pada masyarakat di Kabupaten Natuna.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflection on The Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Bachtiar, Harsja W. (1997). “Pengamatan sebagai Suatu Metode Penelitian”, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Ed. Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. edisi ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design, Quantitative and Qualitative Approaches*. London: Sage Publications. Inc.
- Gellner, Ernest (2006). *Nations and Nationalism*. (1st edn., 1983). Oxford: Blackwell Publishing. liii1152 pp. d16.99 (pbk).
- Hutchinson, John. (2004). “Myth Against Myth: The Nation as Ethnic Overlay”. *Nations and Nationalism*. New Jersey: Wiley-Blackwell.
- Kabupaten Natuna dalam Angka 2017*. (2017). Ranai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
- Neuman, W. Lawrence (1997). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nuraini. (2008). *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Natuna*. Tanjungpinang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Purwatiningsih, Annisa., dan Masykur. (2012). “Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yuridiksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna”. *Jurnal Reformasi*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2012. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi. hlm. 59-67.
- Renan, Ernest.(1992). “What is a Nation?”, text of a conference delivered at the Sorbonne on March 11th , 1882, in Ernest Renan, *Qu'est-ce qu'une nation?*, Paris: Presses-Pocket.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

- Susilowati, Endang., Dhanang Respati Puguh, dan Noor Naelil Masruroh. (2014). "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme pada Generasi Muda di Kepulauan Natuna" *Humanika*, Vol. 19, No. 1. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. hlm. 158-170.
- Susilowati, Endang. dan Noor Naelil Masruroh. (2018). "Merawat Kebhinekaan Menjaga Keindonesiaan: Belajar dari Nilai Keberagaman dan Kebersatuan Masyarakat Pulau." *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3, No. 1, 2018. Semarang: Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. hlm. 13-19.
- Tampi, Butje. (2017). "Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis)." *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 23 No. 10, Juli-Desember 2017. Manado: Universitas Sam Ratulangi. hlm. 1-16.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Witton, Patrick. (2003). "Introduction". *Indonesia*. London: Lonely Planet Publication.
- Sumber Daring**
- Afriyadi, Ahmad Dwi (2018). *Dorong Pengembangan Gas Natuna, Para Ahli Migas Siap Kumpul Bareng*. Senin, 10 September 2018. Juli 2018. <https://finance.detik.com/energi/d-4204863/dorong-pengembangan-gas-natuna-para-ahli-migas-siap-kumpul-bareng>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
- Ekspor Perdana Ikan Napoleon di Natuna*. 6 Februari 2018. <http://www.menlhk.go.id/berita-10086-ekspor-perdana-ikan-napoleon-di-natuna.html>, diunduh tanggal 18 Februari 2019.
- Gustaman. Y. (2017). *Pariwisata di Kabupaten Natuna Tertinggal, Begini Respon PLN*. Kamis, 19 Oktober 2017. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/19/pariwisata-di-kabupaten-natuna-tertinggal-begini-respon-pln?page=2>. diunduh tanggal 8 Februari 2019.
- Ini Cara Jitu KKP Bantu Nelayan Natuna, Termasuk Memberi 60 Kapal*. Kamis, 7 Desember 2017. <https://www.merdeka.com/uang/ini-cara-jitu-kkp-bantu-nelayan-natuna-termasuk-memberi-60-kapal.html>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
- Kamal, Mustafa. (2014). *Malaysia Ingin Kepulauan Natuna Menjadi Wilayahnya*. https://www.kompasiana.com/alchemist/malaysia-inginkan-kep-natuna-menjadi-wilayahnya_54f7bc7ba333112b6f8b4cc7, diunduh tanggal 27 November 2017.
- Kemenhan Bangun Sarana dan Prasarana Pertahanan di Pulau Natuna*, Rabu, 8 Maret 2017. <https://www.kemhan.go.id/2017/03/08/kemhan-bangun-sarana-dan-prasarana-pertahanan-di-pulau-natuna.html>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
- Kemen LHK Gelar Rapat Penilaian DELH*. Selasa, 30 Januari 2018. <https://www.haluankepri.com/news/detail/109824/kemen-lhk-gelar-rapat-penilaian-delh>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
- Luas Wilayah Indonesia*. <https://www.scribd.com/doc/111362334/Luas-Wilayah-Indonesia>, diunduh tanggal 27 Oktober 2018.
- Menhan: Pemerintah akan Bangun Pangkalan Militer Terbesar di Natuna*. 10 Maret 2017. <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/03/10/menhan-pemerintah-akan-bangun-pangkalan-militer-terbesar-di-natuna-2.html>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
- Pengembangan Perikanan: Bangun Ekonomi Maritim dari Natuna*. 16 Januari 2018. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20180116/251/726682/pengembangan-perikanan-bangun-ekonomi-maritim-dari-natuna>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
- Siaran Pers: Festival Senua 2018 Promosikan Pariwisata Kabupaten Natuna*. 1 Juli 2018. <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=4365>, diunduh tanggal 8 Februari 2019.
- Trisna, Yuri B. (2018). *Pulau Subi, Pusat Pertahanan Udara Jepang di Natuna*. 1 Juni 2018. <https://pelantar.id/berita/kepri-raya/natuna/pulau-subi-pusat-pertahanan->

udara-jepang-di-natuna/, diunduh 25 Februari 2019.

Vero, Adit. (2018). *Bupati Natuna Memakai Program Lima Pilar dalam Percepatan Pembangunan Daerahnya*. 24 Januari 2018. <https://www.wartakepri.co.id/2018/01/24/bupati-natuna-memakai-program-lima-pilar-dalam-percepatan-pembangunan-daerahnya/>, diunduh tanggal 18 Februari 2019.

Narasumber

Amiruddin, Pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna.

Arrofik, Kantor Badan Karantina Laut dan Penjaminan Mutu, Kabupaten Natuna.

